

**AKUNTABILITAS PROGRAM PEMERINTAH BERBASIS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS SDGs (STUDI PADA DESA LAMBA KELI KECAMATAN
LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR)**

Anita Oktaviana Weni¹, Fransiskus Randa²
Universitas Atma Jaya Makassar
nitawenni@gmail.com



e-ISSN 2686-0058
p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk
04 Februari 2024
Tanggal revisi
25 Maret 2024
Tanggal diterima
30 Mei 2024

Kata Kunci:

*Akuntabilitas*¹
*Sustainable
Development Goals
(SDGs)*²
*Model Akuntabilitas*³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami atau memahami peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme atau yang biasa disebut interpretivisme. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah berbasis SDGs belum sepenuhnya tercapai dengan baik karena kendala keuangan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, model akuntabilitas moral sangat penting untuk memahami peran Pemerintah Desa Lamba Keli dalam mencapai Sustainable Development Goals di Desa Lamba Keli.

ABSTRACT

This study aims to delve into the role of Local Government in achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Lamba Keli Village, Lamba Leda District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. Employing a constructivist paradigm, commonly referred to as interpretivism, the research adopts a qualitative approach through interviews, observations, and documentation. Findings reveal that SDGs-based government programs have not been fully accomplished due to financial constraints and human resources. Therefore, a moral accountability model is deemed crucial in comprehending the role of Lamba Keli Village Government in attaining Sustainable Development Goals within the community.



PENDAHULUAN

Perhatian terhadap pilar sosial dan lingkungan alam masih kurang diperhatikan, dalam menangani masalah sosial dengan skala besar dan kerusakan signifikan terhadap alam sebagai respons terhadap kebutuhan akan perhatian lebih terhadap isu-isu ini Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* adalah program dunia yang ditetapkan pada 25 September 2015, yang terdiri dari 17 tujuan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Fokus *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah meningkatkan akuntabilitas lembaga politik sebagai kunci untuk tata kelola yang lebih baik.

Dalam perjalanan mencapai tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*, peneliti menemukan berbagai fenomena yang menarik dan mengutip dari berbagai artikel sebagai landasan, yang kemudian akan diperdalam saat melakukan penelitian di lapangan.

Salah satu tujuan *SDGs* yang menonjol adalah terkait tanpa kemiskinan. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi di Nusa Tenggara Timur, yang diungkapkan oleh FRANSISKUS (2022), dimana data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur hanya turun 0.36 persen per tahun, meskipun banyak program pengentasan kemiskinan dan alokasi anggaran triliunan rupiah digelontorkan ke sana, garis kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih mengalami kenaikan cukup tinggi, mencapai rekor pertumbuhan tertinggi dalam delapan tahun terakhir pada tahun 2022. Tujuan *SDGs* adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, termasuk di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menghadapi masalah dalam pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas program pemerintah berbasis *Sustainable Development Goals* belum sepenuhnya tercapai dengan baik, begitu pula di berbagai daerah di wilayah Indonesia yang telah melaksanakan *Sustainable Development Goals* sebagai salah satu prioritas pembangunan daerahnya tidak terkecuali di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu berdasarkan fenomena yang telah ditemukan, maka penulis melakukan penelitian dengan kajian “Akuntabilitas Program Pemerintah berbasis *Sustainable Development Goals SDGs* (di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur) dengan permasalahan penelitian adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur? Yang tujuannya untuk membangun model akuntabilitas Pemerintah dalam mendalami atau memahami peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KAJIAN LITERATUR

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *stewardship* dan teori *stakeholders*. Teori *Stewardship*, seperti yang dijelaskan oleh Hernandez (2008), menekankan sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas kepentingan pribadi. Teori ini sudah diterapkan dalam konteks akuntansi organisasi sektor publik, termasuk organisasi pemerintahan dan non-profit. Teori ini juga relevan dalam konteks Pemerintah Daerah, di mana pemerintah bertindak untuk memajukan kepentingan daerahnya secara etis dan inovatif.

Selanjutnya, teori yang digunakan adalah teori *stakeholders* yang dijelaskan oleh Ghazali (2007). Teori ini menegaskan bahwa organisasi harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dan bukan hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi. *Stakeholder*, seperti yang dikemukakan oleh Sri Rokhlinasari, mencakup setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, *stakeholder* tidak hanya terbatas pada Pemerintah, tetapi juga mencakup masyarakat dan tokoh masyarakat karena mereka terlibat dan berdampak pada kebijakan, proyek, dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas

Menurut United Nations Development Programs (UNDP), akuntabilitas mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dipertanggungjawabkan, serta sebagai

umpan balik untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa depan. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam suatu organisasi pemerintahan adalah dengan memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam perencanaan maupun evaluasi kebijakan maka akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel. Selain itu, memperkuat sistem pelaporan dan *whistleblower protection* juga dapat menjadi langkah penting dalam mendukung budaya akuntabilitas yang kuat dalam organisasi pemerintahan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara holistik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan dimana pemerintah bertanggung jawab secara efektif kepada masyarakat yang dilayani.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tujuan global dan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 17 tujuan utama. Tujuan tersebut mencakup : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

METODE

Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data kualitatif yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme atau yang biasa disebut interpretivisme yaitu memandang bahwa individu menciptakan pemahaman dan makna secara subjektif dari pengalaman kehidupan nyata mereka sehingga realitas yang ada beragam. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah partisipan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian yang berjudul “akuntabilitas program pemerintah berbasis *sustainable development goals SDGs* (studi pada Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur) partisipan yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Guru, Pedagang, Petugas Kesehatan serta Masyarakat. Karena mereka merupakan partisipan yang berkaitan langsung dengan *sustainable development goals (SDGs)*.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Tetapi pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dalam proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas SDGs Tanpa Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Gambaran Implementasi Indikator SDGs Tanpa Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak di Desa Lamba Keli

Pada indikator SDGs yang pertama yaitu tanpa kemiskinan dengan tujuan untuk memberantas segala bentuk kemiskinan ekstrim. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk kedalam kategori Provinsi dengan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Ketika peneliti melakukan diskusi bersama dengan pendamping desa di Kecamatan Lamba Leda, pendamping desa tersebut memberikan keterangan sebagai berikut mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikategorikan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim.

“Bahasa kemiskinan ini juga relatif baik menurut masyarakat maupun di Pemerintahan Desa asumsi dari Pemerintah Desa relatif juga karna pemahaman menurut dia karna kita disini kalau bilang soal miskin kalau nanti pendataan itu nanti ada uangnya itu rame - rame mengaku miskin tapi kalau miskin saja orang merasa tersinggung kalau dia bilang miskin lah begitu. jadi kata miskin itu diterima tapi ada penerimaanya tapi kalau tidak ada korelasi langsung itu sulit untuk dicap sebagai miskin itu jadi seolah – olah yang dialami sekarang pas tidak juga sejahtera tidak juga miskin begitu” (hasil wawancara dengan pendamping desa)

Menurut penjelasan pendamping desa dari hasil manuskrip wawancara kata kemiskinan itu relatif dalam artian masyarakat di Kecamatan Lamba Leda tidak mau diakui atau dikatakan sebagai masyarakat dengan kategori miskin ekstrim karena bagi mereka jika mereka sudah dapat makan dan berpakaian yang layak itu bukan berarti mereka bisa dikatakan kategori masyarakat miskin ekstrim, namun jika masyarakat mendapatkan atau ada pendataan dari Pemerintah setempat mengenai pendataan untuk penerimaan BLT mayoritas masyarakat akan mengaku jika mereka termasuk kategori masyarakat miskin ekstrim. Hal demikian menunjukkan bahwa di satu sisi masyarakat NTT memiliki karakter yang sangat kuat dalam memposisikan diri sebagaimana pikiran setiap individu agar tidak mendapat label yang negatif namun disisi lain karakter tersebut dapat luntur ketika diperhadapkan dengan penyaluran bantuan tunai. Realitas ini dapat mendorong masyarakat tidak dapat melakukan inovasi dan usaha keras dalam memberdayakan dirinya guna terlepas dari bayang-bayang kemiskinan.

Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Indikator SDGs Tanpa Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Peran Pemerintah dalam mewujudkan indikator pertama SDGs yaitu tanpa kemiskinan melalui pemberian BLT atau bantuan tunai langsung. Data terbaru menunjukkan bahwa alokasi dana BLT untuk tahun anggaran dana desa 2023 adalah sebesar Rp 223.200.000 angka ini termasuk besar jika dibandingkan dengan anggaran lain yang peneliti lihat dari data ADD Desa Lamba Keli untuk tahun 2023.

Lampiran 1.1 : Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda

Nomor : 03
Tahun : 2023
Tentang : Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAMBA KELI KECAMATAN LAMBA LEDA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usaha		
1.1.2	Sewanya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.2	Pengalangan Transfer		
1.2.2	Donasi Desa	903.439.000	DD
2	Bagian dari hasil pajak, retribusi daerah kabupaten/kota		
2.1	Bagian dari hasil pajak daerah	17.946.089	
2.2	Bagian dari hasil retribusi daerah	1.949.371	

1	2	3	4
1	Adalat Desa Dasa (10% DAI)		
2	EBIH P PPS		198.415.813
3	Bantuan Keuangan		ADD
4	Bantuan Poswani		
5	Bantuan Kabupaten / Kota		
6	Pesentase Lasa 10%	1.500.000	
7	Ukuran dan Sampingan dari pihak k-3 yang tidak meningkat		
8	Ukuran Pengeluaran Desa yang sel		
9	FORMAL ADD PENJAJARAN	1.123.250.273	
10	1) BELANJA		
11	Belanja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa	237.211.273	ADD
12	2) Penghasilan Tetap Aparat Desa, Tunjangan Aparat Desa, dan Tunjangan BPPD	14.500.000	
13	4) Belanja Pegawai		
14	5) Penghasilan Tetap Kepala Desa	9.900.000	
15	6) Tunjangan Kepala Desa	3.000.000	
16	7) Penghasilan Tetap Perangkat Desa	83.000.000	
17	8) Tunjangan Perangkat Desa	1.600.000	
18	9) - 0	45.000.000	
19	Operasional Perkotaan	1.077.183	
20	2) Belanja Barang dan Jasa		
21	3) Alat Tulis Kantor	1.406.000	
22	4) Cetak dan Pengiriman	210.000	
23	5) Benda Pos	1.170.000	
24	6) Belanja Jasa Hewan ternak	62.000.000	
25	7) Pengeluaran Desa	3.500.000	
26	8) Penyelenggaraan dan Perawatan Fasilitas Kantor	1.077.183	

1	2	3	4
	- Administrasi Bank	1.500.000	
	Operasional Bidang Pemenuhan Syarat Desa	1.433.333	
1	- Belanja barang dan jasa	1.433.333	
1	- Alat Tulis Kantor	666.533	
1	- Pengiriman	300.000	
1	- Makan Minum Papat	47.000	
1	- Cetak dan Pengiriman	18.800	
1	Operasional Bidang Warga dan Rakas Estetika	21.000.000	
1	- Belanja barang dan jasa	21.000.000	
1	- Insentif Rakas Warga	4.800.000	
1	- Insentif Rakas Estetika	16.200.000	
1	Pembelian Operasional Peralatan Desa Yang Berumur dari 7% Desa Desa	12.000.000	
1	- Belanja barang dan jasa	12.000.000	
1	- Kebutuhan Peralatan Desa	2.000.000	
1	- Peralatan dan perlengkapan lingkungan Sosial	4.000.000	
1	- Kebutuhan Sarana dan Prasarana Desa	7.000.000	
1	Dukungan pelaksanaan pendirian klapa desa	10.000.000	
1	- Dukungan pelaksanaan pendirian klapa desa	10.000.000	
1	Pembayaran Desa	596.773,25	DD
1	- Pengisian, pengembangan, pengembagan, dan pemeliharaan sarana prasarana Desa	444.717,325	
1	a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rakas rumah Tindak Larkas Yuni	35.000.000	
1	- Belanja barang dan jasa	35.000.000	
1	- Bantuan Rumah Tindak Larkas Yuni		

[illegible]

	2	3	4
2	Pengadaan PMT yang beryala 0-2 tahun yang akan berakhir DUM	7.200,000	
3	Bantuan bagi 0-2 tahun akan mulai penggantian stunting	1.400,000	
4	Pembelian makanan tambahan bagi 0-2 tahun	148,000	
5	Pengiriman bagi bahan obat folat	3.000,000	
6	Pengadaan PMT yang beryala 0-2 tahun yang akan berakhir DUM	7.200,000	
7	h. Program Peningkatan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasar	28.800,000	
8	1. Kegiatan Peningkatan Fasilitas PAUD	28.800,000	
9	Rehabilitasi Hutan dan Jasa	28.800,000	
10	Insentif Tutor dan Pengelola PAUD	28.800,000	
11	- Tutor PAUD	17.200,000	
12	- Pengelola PAUD	9.600,000	
13	14. Operasional Kelembutan Pelaksanaan Program	1.622,822	
14	Bantuan Bawang dan Jasa	12.642,822	
15	Jasa Kelembutan Pelaksanaan	4.218,700	
16	Operasional 10% 2%	4.342,622	
17	K. Pemasangan SIG, Tahun Anggaran 2023	15.000,000	
18	Pemasangan SIG	15.000,000	
19	Pembelian SIG	15.000,000	
20	Pembelian Rencan	9.600,000	
21	1. Operasional SIG	600,000	
22	2. Sistem Data Sistem Utama TP-PK Desa	600,000	
23	3. Sistem Data Sistem Utama TP-PK Desa	9.000,000	
24	Pembangunan Keterserapan dan Keterliran	9.000,000	
25	Insentif Angkara Liris	4.590,805	
26	Pembayaran Masyarakat	4.590,805	
27	1. Pemasangan Sarana dan Prasarang Angkara Liris dan Saran	15.000,000	
28	A. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000,000	
29	1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000,000	

2	4	1	1	Belanja barang dan jasa	15.000.000	
3	4	1	1	- Pengeluaran Kapasitas Pengantar Desa	10.000.000	
4	4	1	1	- Pengeluaran Kapasitas PPD	5.000.000	
5	4	2	2	Bantuan perantara dan penerima	30.292.005	
6	4	2	2	- Bantuan barang dan jasa	30.292.005	
7	4	2	2	- Bantuan kegiatan	17.175.250	
8	4	2	2	- Bantuan Bina Saver	13.116.755	
9	4	2	2	- Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Musdahik Desa	13.000.000	
10	4	2	2	- Bantuan Lintas Jarak Januari-Desember 2015	223.200.000	
11	5	1	1	- Bantuan Miskin dan Pengeluaran Beras Alami dan Non Alami	16.294.217	
12	5	1	1	JUMLAH BELANJA	1.243.250.273	ADD-00
13	5	1	1	SKOR 1/3 - DAPISAT	-	
14	5	1	1	PENDAPATAN	-	
15	5	1	1	Pencapaian Pembiayaan	-	
16	5	1	1	CLPA	-	
17	5	1	1	Non Pengeluaran Belanja	-	
18	5	1	1	Pencapaian Desa	-	
19	5	1	1	Hasil Kegiatan Desa Yang dijabarkan	-	

1	2	3	4
	(JMLAH : RP)		
3	Pengeluaran Pembelian		
2	Pembelian Dulu Cadangan		
2	Pembelian Modal Dulu		
3	(JMLAH : RP)		
	Pembelian Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)		
	RP/4 tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN FASIL SURPLUS DGTSP)		
		0	

DIREKTOR OLEH
 BENDAHARA

 -R. M. H. J. ADAL-

Lamba, 15 Februari 2023
 DIREKTUR OLEH
 KEPALA DESA LAMBA KULI

 -FERDI ANDRIYAN-

Lamba, 15 Februari 2023
 DIS: SUJUT ODEH
 KEPALA DESA LAMBA KELI
 KEC. LAMBA, KAB. BUKIT BARU
 -FERDINANDUS DIMAN-

Pemberian dana BLT kepada masyarakat diharapkan dapat membantu untuk mencapai tujuan indikator pertama dari *SDGs* yaitu tanpa kemiskinan. Langkah atau tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah di Kecamatan Lamba Leda untuk mewujudkan indikator pertama dari *SDGs* tanpa kemiskinan adalah pemberian dana BLT namun dalam pelaksanaannya pemerintah mengalami kesulitan atau kendala yang membuat mayoritas kepala desa di Kecamatan Lamba Leda tidak setuju dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yaitu pemberian dana BLT hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Lamba Keli yang mengatakan:

“sebagian besar dari suara kepala desa menolak BLT karena itu terjadi kesenjangan di masyarakat dan kadang – kadang malah yang disalahkan pemerintah desa karena masing – masing mengklaim bahwa kami dikatakan ekonomi ekstrim padahal tidak. sementara kami disini berpatokan pada standar persyaratan pada pusat. ini yang sering ribut di desa dan di desa mana saja yang dapat BLT” (hasil wawancara dengan kepala desa lamba keli)

Kepala Desa Lamba Keli menyoroti pentingnya penggunaan dana BLT dengan bijak untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, Kepala Desa juga menggarisbawahi bahwa ada beberapa penerima BLT yang meminta tambahan bantuan, menunjukkan bahwa ada potensi penggunaan dana BLT yang tidak optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program BLT dan perlu adanya evaluasi serta bimbingan lebih lanjut kepada penerima bantuan tentang cara terbaik untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, pernyataan Kepala Desa menggarisbawahi pentingnya pendampingan dan pembinaan terhadap penerima BLT dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut agar dapat memberikan dampak yang nyata dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada indikator kedelapan *SDGs* yang berbunyi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak pembangunan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan Lamba Leda dalam mencapai tujuan indikator pertumbuhan ekonomi adalah dengan membangunkan pasar tradisional yang berlokasi di Ibu Kota kecamatan Lamba leda (Benteng Jawa). Pasar Tradisional Benteng Jawa yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang walaupun tanda kutip masih sangat sederhana dan belum memadai namun masih banyak penjual yang memanfaatkan bahu jalan raya untuk menjual barang dagangannya. Dengan modal yang sangat terbatas mereka kelola dengan penuh antusias.

Lampiran 1.2 : Pasar Tradisional Kecamatan Benteng Jawa; Pedagang Lokal yang memanfaatkan bahu jalan untuk berdagang di Pasar Kecamatan Benteng Jawa;



“pasar Benteng Jawa dibuka hanya pada hari Rabu saja, karena pemerintah setempat sudah menyediakan 3 titik lokasi dalam setiap minggunya. Kalau hari Rabu buka di Benteng Jawa, hari Kamis buka di Bea Muring, hari Jumat buka di Watunggong”. (hasil wawancara dengan penjual pakaian di pasar tradisional Benteng Jawa)

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah satu penjual pakaian di pasar tradisional yang berlokasi di Ibu Kota Kecamatan Benteng Jawa mengatakan bahwa dengan adanya pembangunan pasar tradisional ini sangat membantu masyarakat yang ingin membuat usaha untuk mendapatkan penghasilan kebutuhan rumah tangganya menurut catatan beliau kondisi pasar hanya buka setiap hari Rabu atau satu kali dalam seminggu, pedagang pakaian tersebut harus pergi menjual di tempat lain yang dapat membantu memberikan pendapatan yang lebih lagi. Kedua titik lokasi seperti Bea Muring dan Watunggong berada cukup jauh di luar Ibu Kota Kecamatan Lamba Leda. Lokasi yang disiapkan pemerintah daerah. Para pedagang yang menjual di pasar tradisional harus membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebesar Rp 144.000 perhari jualan selain itu tarif tersebut harus dibayarkan semua pedagang yang berjualan di pasar tradisional tersebut. Tarif ini merupakan tarif yang cukup mahal bagi sebagian pedagang setempat yang hanya mendapatkan keuntungan satu kali dalam satu minggu di pasar tradisional tersebut.

Kendala Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Dalam Mewujudkan Indikator SDGs Tanpa Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak

Salah satu kesulitan Pemerintah di Kecamatan Lamba Leda dalam mewujudkan indikator pertama dari SDGs yaitu tanpa kemiskinan adalah sumber daya masyarakat dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sumber daya manusia adalah pola pikir masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak ingin berusaha untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan hanya ingin berharap bantuan dari pemerintah hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lamba Keli yang mengatakan sebagai berikut :

“Tugas pemerintah desa itu sangat berat karena berhadapan langsung dengan masyarakat, kita tau persis mental, watak, karakter masyarakat seperti apa. Yang mau maju yang tidak yang berpikir yang baik itu kita tau semua dan ini butuh kerja keras bukan hanya kepala desa tapi semua tokoh masyarakat, tokoh adat terlibat didalamnya untuk memberikan pemahaman, dorongan supaya mereka berubah untuk bisa bersaing dengan dana sekecil apapun tapi kalau tidak itu buruk, biar ratusan bantuan dana pusat itu tidak akan, karena ada juga mental masyarakat mereka berpikir lebih baik jangan kerja karena tiap 3 bulan saya dapat Rp 300.000, padahal tujuan pemerintah lain” (hasil wawancara dengan kepala desa lamba keli)

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan pada indikator pertama yaitu tanpa kemiskinan mengalami kendala dalam mewujudkan tanpa kemiskinan meskipun terdapat program dari pemerintah pusat yaitu pemberian dana BLT namun dalam kenyataannya pemberian dana BLT tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah. Dari hasil diskusi dengan Pemerintah Desa Lamba Keli peneliti mencoba memberikan masukan untuk Kepala Desa yaitu dengan membuat penyuluhan bagi warga yang akan menerima dana BLT yang mana 2 hari sebelumnya warga akan menerima dana BLT, diundang dan diberikan pemahaman seperti masalah penggunaan dana BLT yang akan diterima, bukan untuk dihabur – hamburkan begitu saja tetapi dana tersebut digunakan sebagai modal dasar untuk membuka usaha kecil sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian rumah tangga yang lebih baik. Jika hal tersebut diterapkan seperti demikian ke warga desa, secara otomatis angka kemiskinan daerah akan berkurang setiap tahunnya. Dan

ternyata Kepala Desa bersama stafnya sangat antusias menerima masukan peneliti pada saat itu.

Demikian pula dengan indikator ke delapan dari *SDGs* yaitu pertumbuhan ekonomi yang mana Pemerintah telah membuat pembangunan pasar tradisional yang diharapkan dapat menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian di Kecamatan Lamba Leda. Namun hal ini berbeda dengan salah satu pemilik bengkel yang berlokasi di jalan poros Ibu Kota Kecamatan Benteng Jawa. Pemilik bengkel tersebut membuka usahanya bukan dari sewa tempat yang telah disediakan Pemerintah setempat melainkan dari sewa tanah Gereja atau milik swasta. Pemilik bengkel tersebut mengatakan :

“tanah/bengkel yang ditempati ini milik misi/gereja St. Yusuf Benteng Jawa. saya sewa tanah ini dari pastoran paroki St.Yusuf Benteng Jawa ukurannya 8m x 16m atau ukurannya sama dengan 128m². itu pun saya kontrak dalam bentuk lahan kosong. Terus saya bangun sendiri dengan tarif dipungut Rp 60.000/m².”setiap tahunnya saya harus bayar Rp 7.680.000” (hasil wawancara dengan pemilik bengkel benteng Jawa)

Pembangunan Pasar Tradisional yang diberikan untuk masyarakat setempat seharusnya dapat memberikan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda. Namun para pedagang atau pengusaha lokal masih menghadapi beberapa kendala dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang pakaian di Pasar Tradisional yang berlokasi di Ibu Kota Kecamatan Lamba Leda beliau mengatakan untuk modal yang dikelola merupakan modal sendiri yang diperoleh dari hasil penjualan kopi, cengkeh dan kemiri. Berbeda dengan penjual pakaian yang memiliki modal dari hasil perkebunannya salah satu pemilik bengkel yang berlokasi di jalan poros Benteng Jawa memiliki kendala dalam mewujudkan bisnis atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hal itu disebabkan karena tarif yang dipungut untuk biaya sewa terlalu besar untuk pemilik bengkel tersebut. Pemilik bengkel tersebut mengatakan pendapatan minimal yang diterima per harinya hanya Rp 50.000 pendapatan tersebut sebenarnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari ditambah lagi pemilik bengkel tersebut harus membayar biaya sewa sebesar Rp 7.680.000.per tahunnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya untuk mencapai akuntabilitas program pemerintah yang berbasis *sustainable development goals* atau tujuan pembangunan yang berkualitas pada indikator kedelapan di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda adalah minimnya modal yang dimiliki pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya serta kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda yang mengharuskan masyarakat untuk mencari pekerjaan diluar kampung halamannya.

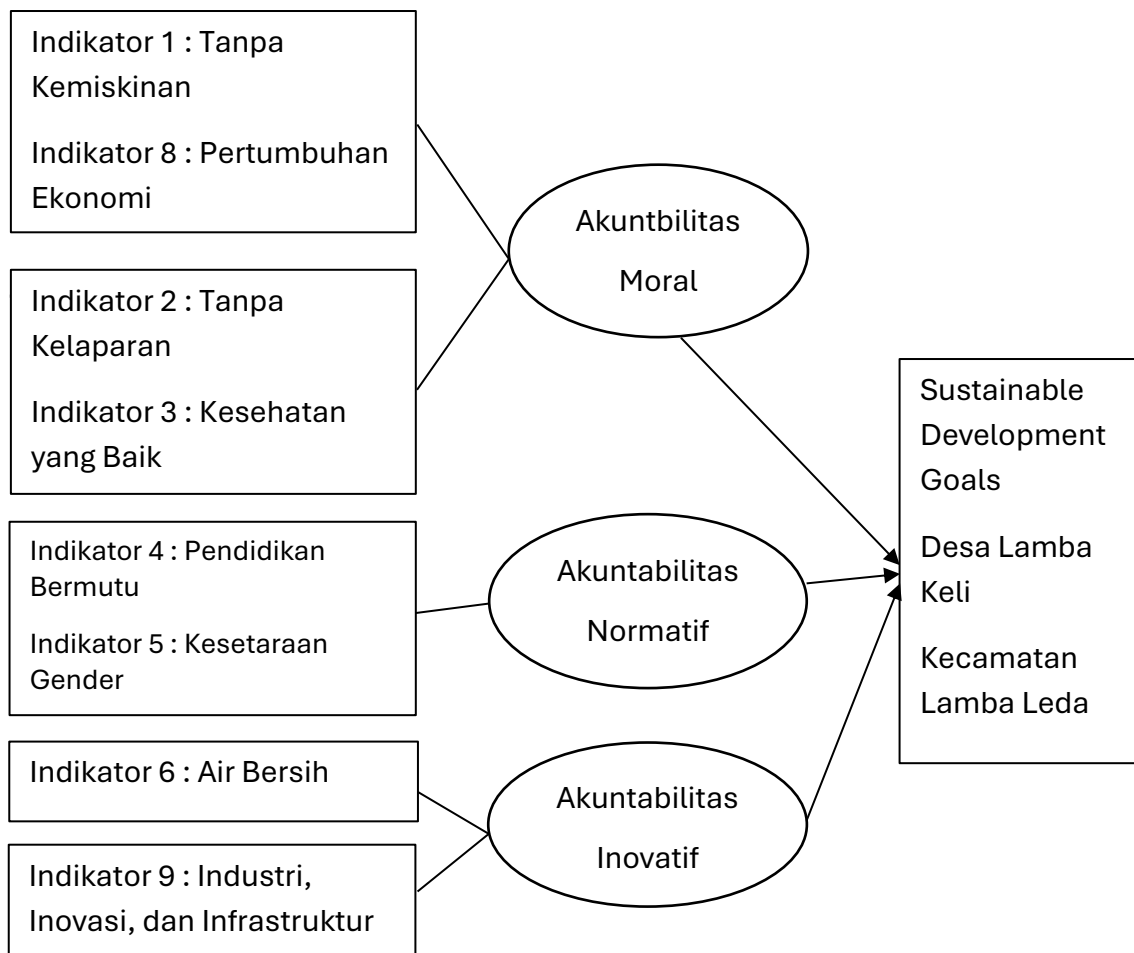
Lampiran 1.3 : Bengkel Motor yang berlokasi di Jalan Poros Kecamatan Lamba Leda



MODEL AKUNTABILITAS *SDGs* DESA LAMBA KELI KECAMATAN LAMBA LEDA

Model Akuntabilitas *SDGs* Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda

Dalam konteks upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, penting untuk memahami model akuntabilitas yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda Desa Lamba Keli. Model ini menjadi landasan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami model akuntabilitas yang diterapkan, dapat diselidiki sejauh mana upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian *SDGs* di tingkat lokal, serta identifikasi area-area yang memerlukan peningkatan atau perbaikan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam analisis lebih lanjut, model akuntabilitas ini akan menjadi pokok pembahasan utama untuk mengevaluasi keterlibatan dan efektivitas tindakan pemerintah Desa Lamba Keli dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



Model Akuntabilitas Pemerintah Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* terdiri dari delapan indikator yaitu indikator (1) tanpa kemiskinan ; (2) tanpa kelaparan ; (3) kesehatan yang baik ; (4) pendidikan bermutu ; (5) kesetaraan gender ; (6) air bersih ; (8) pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur. Delapan indikator tersebut saling berhubungan dan membentuk tiga model akuntabilitas yaitu akuntabilitas moral, akuntabilitas normatif, serta akuntabilitas inovatif.

Indikator kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi membentuk akuntabilitas moral. Akuntabilitas moral adalah suatu perilaku yang memiliki hubungan erat dengan tingkah laku, akhlak, dan mental yang dapat membentuk karakter dalam diri seseorang, sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk baik melalui perbuatan ataupun sikap di masyarakat. Salah satu contoh penerapan akuntabilitas moral di Desa Lamba Keli adalah pemerintah setempat telah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dalam mewujudkan indikator tanpa kemiskinan namun program tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah dan disalahgunakan oleh masyarakat setempat dan tidak membuat masyarakat menjadi lebih baik malah menjadi lebih buruk. Akuntabilitas moral sangat diperlukan dalam membentuk *sustainable development goals* di Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda agar *sustainable development goals* dapat tercapai dengan baik maka harus dimulai dari pembentukan mental atau pola pikir masyarakat itu sendiri, sehingga apapun program dari pemerintah setempat dapat disambut dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Akuntabilitas moral dapat pula memberikan wawasan masa depan kepada masyarakat ataupun konsekuensi dalam kehidupan sehingga seseorang dapat mempertimbangkan sesuatu dengan sangat mapan sebelum bertindak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, dalam mencapai indikator pertama dan kedelapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu tanpa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja layak tidaklah mudah. Terutama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikategorikan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai indikator pertama *SDGs* seperti pemberian dana BLT belum memberikan hasil yang diharapkan. Bahkan, hal tersebut telah menciptakan budaya kurang produktif di masyarakat. Begitu pula dengan upaya mencapai indikator kedelapan *SDGs*, dimana pemerintah telah membangun pasar tradisional. Namun, keterbatasan modal dan biaya sewa tempat yang tinggi telah menyulitkan pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis juga menjadi masalah yang dihadapi oleh mereka. Terkait lapangan kerja layak, mayoritas masyarakat Desa Lamba Keli berprofesi sebagai PNS atau petani, namun keterbatasan lapangan kerja membuat sebagian besar masyarakat memilih untuk merantau demi peluang pendapatan yang lebih menjanjikan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa program pemerintah berbasis *Sustainable Development Goals* di Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hambatan utamanya terletak pada aspek keuangan serta manajemen sumber daya manusia yang belum optimal, yang memerlukan pengembangan dan peningkatan lebih lanjut. Pembentukan kerangka kognitif masyarakat sangat penting, karena memengaruhi skema kognitif, sikap, dan pola perilaku dalam wilayah tersebut, yang menjadi tantangan utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Oleh karena itu, model akuntabilitas moral sangat penting untuk memahami peran Pemerintah Desa Lamba Keli dalam mencapai *Sustainable Development Goals*. Akuntabilitas moral diperlukan untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam hal sikap dan pola pikir

masyarakat. Dengan pola pikir yang positif dan adaptif, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan berinovasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta beradaptasi terhadap perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abugre, J.B. (2018), "Cross-cultural communication imperatives", *Critical Perspectives on International Business*, Vol. 14 Nos 2/3, pp. 170-187.
- Alexander, Hilda B. 2023. *Riset KG Media: Gen Z Punya Peran Krusial Percepat SDGs di Indonesia*. Kompas.com. <https://lestari.kompas.com/read/2023/07/28/100000486/riset-kg-media--gen-z-punya-peran-krusial-percepat-sdgs-di-indonesia>
- Arie, Basuki 2023. 5 Langkah Pemerintah untuk tekan kemiskinan di Indonesia. <https://www.merdeka.com/uang/ini-5-langkah-pemerintah-untuk-tekan-kemiskinan-di-indonesia.html>
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Timur. 2023. *Kabupaten Manggarai Timur Dalam Angka (East Manggarai Regency in Figures) 2023*. Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bappenas, 2021. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*
- Bednar, Dominic J and Tony G. Reames. 2020. *Recognition of and response to energy poverty in the United States*. University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA. *Nature Energy*. Vol 5 page 432 – 439
- Danur Lambang Pristiandaru. 2023. *Konservasi Energi Termal Berperan Bagi Pencapaian SDGs*. <https://lestari.kompas.com/read/2023/09/01/070000486/konservasi-energi-termal-berperan-bagi-pencapaian-sdgs>
- Darmawan, Agus Dwi. 2023. *September 2022, garis kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Rp 380,57 ribu per kapita per bulan*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/02/september-2022-garis-kemiskinan-di-nusa-tenggara-timur-rp-380-57-ribu-per-kapita-per-bulan#:~:text=Garis%20kemiskinan%20per%20kapita%20makanan%20di%20provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Timur,ribu%20per%20kapita%20per%20bulan>
- Dentoni, D., Bitzer, V. and Schouten, G. (2018), "Harnessing wicked problems in multi-stakeholder partnerships", *Journal of Business Ethics*, Vol. 150 No. 2, pp. 333-356.
- Dheri, Agriesta. 2021. *"Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini 3 Strategi Kabupaten Manggarai Timur"*. Kompas.com.
<https://regional.kompas.com/read/2021/11/17/234454778/turunkan-angka-kemiskinan-ekstrem-ini-3-strategi-kabupaten-manggarai-timur?page=all>
- Dorothee Fischer. 2020. *Challenges Implementing Sustainable Development Goals Asia*. Capacity4dev Team, European Union.
<https://capacity4dev.europa.eu/articles/challenges-implementing-sustainable-development-goals-asia>

- Dziubaniuk, Olga and Maria Ivanova-Gongne. 2021. *Challenges of network interaction in managing sustainable development projects in developing countries: case of an international consulting company*. Vol. 18 No. 4, 2022 pp 546-573. School of Business and Economics, Åbo Akademi University, Turku, Finland, and Ekaterina Berdysheva Independent Researcher.
- Eghosa, Ekhatior. 2019. *Barriers to implementation of SDGs in Africa: the need for effective business and government collaboration*. African International economic law network <https://www.afromonicslaw.org/2019/11/29/barriers-to-implementation-of-sdgs-in-africa-the-need-for-effective-business-and-government-collaboration>
- FRANSISKUS PATI HERIN. 2022. *Triliunan Rupiah Mengalir, Kemiskinan di NTT Hanya Turun Tipis*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/10/triliunan-rupiah-mengalir-kemiskinan-di-ntt-hanya-turun-tipis>
- Floresa.co. John Manasye. 2023. Gizi buruk mengintai anak-anak di Manggarai Timur <https://floresa.co/2023/01/16/gizi-buruk-mengintai-anak-anak-di-manggarai-timur/>
- floreseditorial.com. *Manggarai Timur*, *Detakterkini.com*. <https://www.google.com/amp/s/www.floreseditorial.com/news/amp/pr-3972904157/47-kk-di-lamba-leda-utara-konsumsi-air-keruh%3fpage=1>
- Ghozali Imam dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hernandez, M. 2008. Promoting Stewardship Behavior in Organisations: A Leadership Model. *Journal of Business Ethics*, (80)1, 121–128.
- Sri Rokhlinasari. *Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- United Nations Development Programme. 2023. *THE SDGS IN ACTION*. https://www.undp.org/sustainable-development-goals/no-poverty?gclid=Cj0KCQjwrfymBhCTARIsADXTabkf8_oXLdAzWG2-LF-qMag4gimM5nAtyuH3MLMhZeBOMGoCbpTFLpcaApMmEALw_wcB